

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH (HPP) TERHADAP BERAS

Adil Makmur Sentosa

ABSTRAK

Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Pemerintah menetapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras untuk melindungi produsen dan konsumen dari gejolak harga pasar. Metode penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposive (sengaja). Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang didapat yang diperoleh melalui instansi – instansi yang terkait seperti BPS, Badan Ketahanan Pangan Sumatera Utara. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Beras dipengaruhi tingkat ketersediaan beras di Sumatera Utara. Ketersediaan beras di Sumatera Utara mencukupi kebutuhan beras di Sumatera Utara. Transmisi harga GKP mempengaruhi oleh Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Kata Kunci : Ketersediaan Pangan, Harga Pembelian Pemerintah

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar, sehingga ketersediaan pangan khususnya beras bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat maka masyarakat akan memperoleh hidup yang tenang dan akan lebih mampu berperan dalam pembangunan. Penyediaan pangan yang cukup, merata dan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu prioritas yang terpenting guna mewujudkan ketersediaan pangan. Karena pada dasarnya beras adalah komoditas strategis dan merupakan pangan pokok bangsa Indonesia. Konsumsi beras setiap tahun selalu meningkat seiring dengan laju penambahan penduduk. Sudah banyak upaya untuk mengerem laju konsumsi beras dengan penganekaragaman pangan lokal namun tampaknya setiap tahun selalu mengalami kenaikan (Sunanda U, 2008).

Peningkatan produksi padi, selain untuk menjamin adanya stok pangan (beras) Nasional, juga merupakan salah satu upaya untuk menaikkan pendapatan/ kesejahteraan petani dan keluarganya. Namun peningkatan produksi yang dicapai petani pada panen raya, pada kenyataannya belum membawa petani pada peningkatan pendapatan/kesejahteraan tersebut. Sesuai dengan pola produksi tahunan, produksi gabah pada saat panen raya di daerah sentra produksi selalu melimpah, sedangkan permintaan

gabah/beras bulanan relatif stabil, mengikuti hukum ekonomi, dimana penawaran meningkat permintaan akan menurun, maka demikian juga yang dialami petani pada musim panen raya, dimana harga gabah turun sampai dibawah harga dasar bahkan sampai titik terendah, sehingga tidak memberi keuntungan kepada petani. Sebaliknya pada musim paceklik, sering kali produksi yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan sehingga harganya meningkat, bahkan sampai tidak terjangkau oleh petani yang pada saat itu justru tidak memiliki lagi produksi gabah. Pada saat panen raya (Maret - April), harga gabah di tingkat petani turun, dengan harga titik terendah pada bulan April. Keadaan berbeda terjadi pada musim panen (Juni - Juli), harga gabah lebih tinggi daripada musim panen raya. Harga akan terus menaik pada bulan berikutnya dengan harga tertinggi terjadi pada bulan Desember – Januari (BKP sumut, 2005).

Upaya peningkatan produksi dan pendapatan petani dihadapkan pada berbagai kendala dan masalah. Kekeringan dan banjir tidak jarang mengancam produksi di beberapa daerah, penurunan produktivitas lahan pada sebagian areal pertanaman, hama penyakit tanaman yang terus berkembang, dan tingkat kehilangan hasil pada saat dan setelah panen yang masih tinggi merupakan masalah yang perlu dipecahkan serta tidak adanya pencatatan usahatani menyebabkan petani tidak dapat menghitung berapa besar keuntungan/kerugian yang diperoleh. Hal ini penting artinya dalam upaya meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan. (Sumaryanto dan Sudaryanto, 2001).

Dalam menanggulangi masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa instrumen kebijakan jangka pendek yang pada intinya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gejolak harga. Kebijakan tersebut antara lain adalah; Pertama penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk padi/beras; dan Kedua pengenaan tarif, kuota, dan pengaturan waktu impor serta operasi pasar untuk komoditas tersebut.

Penurunan produktivitas akan menyebabkan produksi padi secara nasional akan stagnan, atau malahan menurun, apalagi dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi yang akan menyebabkan kebutuhan impor beras menjadi sangat besar. Kondisi ini tentunya tidak menguntungkan bagi ketahanan pangan Nasional dan ekonomi Nasional, bahkan stabilitas Nasional.

Penentuan HPP beras oleh pemerintah diharapkan dapat membantu para petani dalam memenuhi persediaan beras. Akan tetapi pada kenyataannya kesejahteraan petani tidak mengalami peningkatan. Petani merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Melihat fenomena yang terjadi, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh HPP beras yang ditetapkan pemerintah terhadap ketahanan pangan dari aspek ketersediaan.

Di Propinsi Sumatera Utara maupun secara Nasional beras merupakan komoditas strategis dalam kehidupan sosial ekonomi nasional, karena beras menjadi bahan makanan pokok sekitar 95% penduduk, dan menjadi sumber pendapatan bagi sekitar 21 juta rumah tangga petani. Sebagai bangsa dengan penduduk dan potensi sumberdaya pertanian yang besar, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri (BKP Sumut, 2005).

Untuk menjaga harga beras tetap terkendali produksi nasional tetap harus tetap seimbang dengan konsumsi nasional. Terjadinya kebijakan impor hanya akan meningkatkan harga beras internasional, karena itu dalam jangka panjang semakin besar ketergantungan terhadap impor semakin tidak terjamin pasokan beras secara murah. Kebijakan impor hanya relevan untuk mengendalikan harga dalam jangka pendek tetapi amat riskan dalam jangka panjang (Sugema, 2005).

Kebijakan harga melalui jaminan harga dasar dapat memperkecil resiko dalam berusahatani, karena petani terlindungi dari kejatuhan harga jual gabah/beras di bawah ongkos produksi, yang sering dalam musim panen raya. Manakala risiko suatu usaha dapat ditekan sekecil mungkin, maka ketersediaan beras dari produksi dalam negeri dapat terjamin. Ketersediaan beras dari produksi dalam negeri menjadi salah satu unsur penting dalam memperkuat ketahanan pangan (Sawit, 2010).

METODE PENELITIAN

Metode penentuan wilayah ditentukan secara purposive yaitu secara sengaja dengan memilih provinsi Sumatera Utara sebagai daerah penelitian karena Sumatera Utara memiliki potensi sebagai salah satu daerah penghasil padi di Indonesia.

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal ekonomi dan bisnis, data terbitan institusi – institusi terkait seperti Dinas Pertanian Sumatera Utara, Badan Ketahanan Pangan Sumatera Utara, dan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. Dalam penelitian ini jenis data yang dipakai adalah data tahunan, yaitu dari tahun 2000 – 2011.

Untuk hipotesis 1 dianalisis dengan menggunakan metode regresi yaitu menganalisis pengaruh faktor – faktor yang mempengaruhi harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap beras :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \mu$$

Keterangan :

Y = harga pembelian pemerintah a = konstanta

b1-b4 = koefisien variabel regresi

X1 = Produksi beras

X2 = Cadangan beras

X3 = Impor beras

X4 = Konsumsi beras

μ = Random error

Untuk hipotesa 2 akan dinilai dari berapa besar nilai koefisien regresi yang diakibatkan pengaruh faktor – faktor yang mempengaruhi harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap beras secara parsial dengan kriteria ;

Koefisien regresi < 0 , H0 diterima H1 ditolak

Koefisien regresi > 0 , H0 ditolak H1 diterima

Untuk hipotesa 3. Elastisitas transmisi harga digunakan untuk mengetahui pengaruh pasar antara pasar tingkat produsen dan pasar tingkat konsumen dengan melihat nilai koefisien regresi. Dengan kriteria nilai koefisien regresi b1 menggambarkan besarnya elastisitas transmisi harga antara harga ditingkat petani dengan harga ditingkat konsumen. Jika b1 = 1, berarti perbedaan harga tingkat produsen dan konsumen hanya dibedakan oleh margin pemasaran yang tetap. Jika b1 > 1, persentase kenaikan harga tingkat konsumen lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat produsen. Jika b1 < 1, persentase kenaikan harga tingkat konsumen lebih kecil dibanding tingkat produsen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beras merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan beras pun semakin meningkat. Oleh karena itu pemerintah menetapkan beberapa kebijakan salah satunya kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) beras guna menjaga stabilitas harga beras.

Kebijakan HPP yang ditetapkan pemerintah dari tahun ke tahun selalu ditingkatkan. Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa kebijakan HPP oleh pemerintah selalu mengalami peningkatan. Kebijakan HPP ini lah yang dijadikan harga dasar penjualan gabah oleh petani. Artinya untuk melindungi petani maka harga gabah tidak boleh dijual dibawah harga dasar gabah yang telah ditetapkan pemerintah. Pada dasarnya penetapan Kebijakan HPP oleh pemerintah adalah merupakan intervensi pemerintah dalam menjaga kestabilan harga di pasar. Rendahnya elastisitas permintaan atas gabah dibandingkan elastisitas penawaran gabah yang dapat menyebabkan timbulnya kondisi tidak stabil yang tentu saja dapat merugikan produsen. Perubahan pada supply ini akan ditransmisikan dalam bentuk tekanan besar terhadap harga produsen yang akan menyebabkan terjadinya kondisi tak seimbang pada harga pasar (terjadi pergeseran keseimbangan pasar). Fakta ini lah yang menyebabkan intervensi pemerintah dalam penetapan HPP gabah sangat penting terutama melindungi kesejahteraan produsen dan konsumen secara berimbang.

Kebijakan HPP oleh pemerintah mempertimbangkan aspek-aspek tertentu seperti harga ditingkat petani yang mempertimbangkan tingkat pendapatan petani tersebut, perubahan pola konsumsi akibat harga yang terbentuk berdasarkan pada penetapan HPP serta, harapan penetapan HPP dalam rangka merangsang meningkatkan produksi oleh petani agar tercapai keseimbangan pangan.

Analisis Regresi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Terhadap Beras Di Sumatera Utara

Variabel bebas	Koefisien regresi	Standar eror	T – hitung	Signifikansi
Constanta	-9832,85	2199,927	-4,470	(●)
X1=Produksi beras	0,001	0,000	2,626	(●)

X2=Impor beras	0.003	0.002	1,951	(●)
X3=Cadangan beras	0.005	0.015	0,321	(●●)
X4=Konsumsi beras	0,003	0,001	2,919	(●)
R-Square = 0,968				0.000 ^a
F-Hitung= 52,392				
F-Tabel = 3,11				

Keterangan : (●) = nyata pada taraf kepercayaan 95%
 (●●) = tidak nyata pada taraf kepercayaan 95%

Dari hasil analisis regresi tabel, maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$Y = -9832,85 + 0,001(2,626) + 0,003(1,951) + 0,005(0,321) + 0,003(2,919) + \mu$ Dari model di atas dihasilkan nilai R-square sebesar 0,968. Yang artinya bahwa 96,8% Harga Pembelian Pemerintah beras mempengaruhi produksi beras, impor beras, cadangan beras dan konsumsi beras. Sedangkan 3,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari model persamaan di atas.

Secara serempak, pengaruh variabel harga pembelian pemerintah beras dapat dijelaskan oleh variabel produksi beras, impor beras, cadangan beras, konsumsi beras adalah nyata pada taraf kepercayaan 95%. Pernyataan ini ditunjukkan dari uji F, yaitu F-Hitung = 52,392 > F-Tabel = 3,11 dan nilai signifikansi 0,000. Kriteria penilaian adalah jika F-Hitung > F-Tabel adalah signifikan, maka persamaan yang digunakan adalah linier.

Indikator penentuan Harga Pembelian Pemerintah dinilai dari besar nilai persentase koefisien regresi yang terjadi. Pengaruh Produksi Beras Dari hasil analisis yang ditampilkan table 2 di atas, maka diperoleh bahwa produksi menjadi salah satu indikator penentuan Harga Pembelian Pemerintah. Hal ini di tunjukkan oleh nilai koefisien regresi produksi beras yaitu 0.001. Secara teori, kenaikan harga suatu barang akan memacu meningkatnya jumlah produksi. Namun kenyataannya produksi beras tetap menurun meskipun harga pembelian pemerintah terhadap beras naik pada tahun 2000 dan 2001. Selain itu, konsumsi beras juga tidak turun meski harga beras semakin meningkat. Hal ini terjadi karena beras merupakan salah satu makanan pokok yang tingkat konsumsinya terus bertumbuh.

Dari hasil analisis yang ditampilkan pada table 2 di atas, diperoleh bahwa impor beras berpengaruh terhadap penentuan harga pembelian pemerintah (HPP) beras. Pemerintah melakukan impor guna untuk mengantisipasi dan menutupi kemungkinan terjadinya kekurangan beras agar harga beras tetap stabil. Tapi pada kenyataannya, jumlah impor tetap meningkat meskipun jumlah produksi beras lokal meningkat. Hal ini terjadi akibat tingkat konsumsi yang terus meningkat. Pengaruh Cadangan Beras

Dari hasil analisis yang ditampilkan table 2 di atas, diperoleh bahwa cadangan beras tidak berpengaruh terhadap penentuan harga pembelian pemerintah. Secara parsial, cadangan beras tidak berpengaruh terhadap penentuan harga pembelian t- hitung cadangan beras lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel.

Hal ini disebabkan pemerintah menyediakan cadangan beras hanya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan beras atau untuk memberikan bantuan kepada daerah lain yang sedang membutuhkan beras. Pengaruh Konsumsi Beras

Dari hasil analisis table 2 di atas, diperoleh bahwa konsumsi beras berpengaruh terhadap penentuan harga pembelian pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,003. Masyarakat Sumatera Utara mengkonsumsi bahan pangan umumnya belum beragam, bergizi dan berimbang sesuai pola pangan harapan, dimana kalori yang dihasilkan lebih kurang 60% masih bersumber dari karbohidrat dengan makanan pokok utama beras.

Elastisitas Transmisi Harga

Tabel 3. Analisis Regresi Harga Pembelian Pemerintah terhadap Harga GKP petani Pada Tabel akan dilakukan formulasi untuk melihat sejauh mana penetapan HPP oleh pemerintah dapat mempengaruhi harga gabah ditingkat petani. Dibawah ini dapat dilihat formulasi yang terbentuk akibat penetapan HPP GKP oleh pemerintah pengaruhnya terhadap harga ditingkat petani:

$$y = 247,258 + 0,761x \text{ keterangan:}$$

Y = Harga Pembelian Pemerintah (Rp)

Variabel Bebas	Koefisien regresi	Standar error	T-Hitung
Constant	247,258	90,943	2,719
X1=Harga GKP petani	0,761	0,043	17,509

X = Harga GKP petani (Rp)

Berdasarkan formulasi tersebut dapat dilihat bahwa elastisitas transmisi harga yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap harga di tingkat petani menunjukkan sebesar 76,1% penetapan HPP GKP oleh pemerintah dapat mempengaruhi perubahan harga di tingkat petani. Dapat pula dikatakan bahwa setiap Rp 100 pemerintah meningkatkan HPP GKP maka harga jual gabah ditingkat petani akan mengalami transmisi harga GKP sebesar Rp 761.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat di katakan bahwa kebijakan pemerintah dalam penetapan HPP GKP mempengaruhi harga yang terjadi ditingkat petani. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suharyanto (2000) elastisitas transmisi harga yang terjadi memperlihatkan seberapa besar presentase perubahan harga yang terjadi di satu sisi mampu mempengaruhi perubahan harga yang terjadi di sisi lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa intervensi pemerintah dalam penetapan HPP GKP mampu mentransmisikan harga GKP di tingkat petani, serta elastisitas transmisi harga yang terbentuk di tingkat petani pada umumnya berada diatas harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka disimpulkan sebagai berikut :

Hasil estimasi identifikasi masalah 1 yang dilakukan diperoleh bahwa nilai R- squared sebesar 0.968. Artinya variasi yang terjadi pada variabel Harga Pembelian Pemerintah (Y) beras dipengaruhi oleh produksi beras (X1), impor beras (X2), cadangan beras (X3), konsumsi beras (X4) sebesar 96.8%. Sedangkan 3.2% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari model persamaan di atas.

Hasil estimasi identifikasi masalah 2 yang dilakukan diperoleh bahwa secara parsial produksi beras (X1), impor beras (X2), konsumsi beras (X4) berpengaruh terhadap

penentuan Harga Pembelian Pemerintah (Y). Sedangkan cadangan beras (X3) tidak mempengaruhi secara parsial.

Hasil estimasi identifikasi masalah 3 yang dilakukan diperoleh bahwa elastisitas transmisi harga yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap harga di tingkat petani

menunjukkan sebesar 76,1% penetapan HPP GKP oleh pemerintah dapat mempengaruhi perubahan harga di tingkat petani. Dapat pula dikatakan bahwa setiap Rp 100 pemerintah meningkatkan HPP GKP maka harga jual gabah ditingkat petani akan mengalami transmisi harga GKP sebesar Rp 761.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Ketahanan Pangan / Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, 2005. Draft Rancangan Kebijakan dan Program Peningkatan Kebijakan Ketahanan Pangan tahun 2005. Medan.

Sumaryanto dan T. Sudaryanto, 2001. Perubahan Paradigma Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Implikasinya Terhadap Strategi Pengembangan Produksi Pangan. Forum Agro Ekonomi.

Sunanda, U. 2008. Analisis Padi Sawah di kab. Pandeglang. <http://www.dispertanak.pandeglang.go.id>. 10 November 2008.

Sawit, M. H. 2000. Ketahanan pangan dalam Liberalisasi Perdagangan. Jakarta. Sugema, I. 2005. Krisis Kebijakan Beras. Kompas Jumat 20 Januari 2006. Kolom Opini. Jakarta